

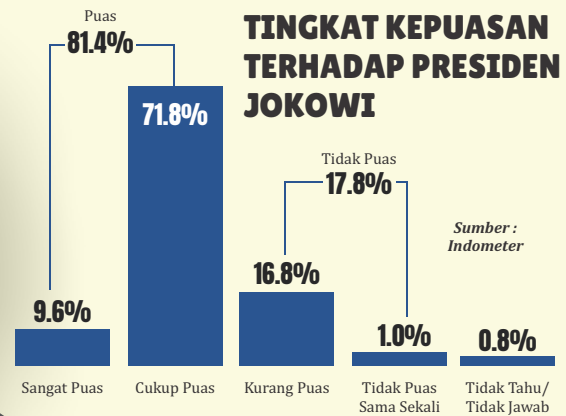
HOAX SISTEM PEMILU NAIK KE PENYIDIKAN DENNY 'BERKICAU' LAGI SINGGUNG JOKOWI

Kegaduhan yang ditimbulkan Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana memasuki babak baru. Bareskrim Polri telah menaikkan status perkara dugaan penyebaran berita bohong atau hoax soal putusan sistem pemilu coblos gambar partai ke tahap penyidikan. Penyelesaian kasus tampaknya akan berjalan alot. Pasalnya, 45 pegiat hukum diklaim siap dampingi Denny Indrayana. Ada nama Dr. Bambang Widjojanto, S.H, Haris Azhar, S.H., M.A. hingga Febri Diansyah, S.H dalam daftar tersebut. Kondisi makin runyam, karena 'kicaun' baru kembali ditebar Denny. Pakar hukum tata negara ini kembali menjabarkan setidaknya tiga alasan mengapa Jokowi harus dimakzulkan. Para petinggi partai pun melayangkan keberatan dengan pernyataan tersebut. Denny pun disebut sebagai 'racun' demokrasi. Duh!

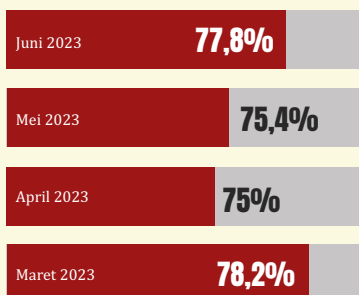
(Baca Hal 11)



TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PRESIDEN JOKOWI



SURVEI KEPUAS KINERJA JOKOWI VERSI POPULI CENTER



Government (Hal.2)
KPK 'Pamerkan'
Harta Lukas Enembe
Uang Rp 81 Miliar hingga
Liontin Kepala Singa

KPK 'Pamerkan' Harta Lukas Enembe Uang Rp 81 Miliar hingga Liontin Kepala Singa

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan hasil penyitaan 27 aset milik Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang mencapai ratusan miliar Rupiah. Penyitaan itu dilakukan dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyeret Lukas menjadi tersangka.

"Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui asset recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Senin (26/6/2023).

KPK menduga aset-aset tersebut dibeli Lukas menggunakan duit korupsi. Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Lukas menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Lukas didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar dari proyek-proyek infrastruktur yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Dari kasus tersebut, KPK menduga Lukas juga melakukan pencucian uang. Pencucian uang tersebut dilakukan dengan cara membelanjakan, atau mengubah bentuk uang menjadi aset yang diduga merupakan bagian dari upaya menyembunyikan asal usul aset tersebut. Untuk mengungkap rasuah inilah, KPK melakukan penyitaan terhadap 27 aset milik Lukas Enembe. Aset tersebut berbentuk uang tunai, hotel hingga berbagai bentuk perhiasan.

Eksepsi Ditolak

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

Sebelumnya, Lukas Enembe dan tim penasihat hukumnya menyatakan keberatannya atas dakwaan Jaksa KPK. JPU Komisi Antirasuah itu juga telah membacakan jawaban atas eksepsi yang disampaikan Lukas Enembe.

"Mengadili, menyatakan nota keberatan atau eksepsi terdakwa Lukas Enembe dan penasihat hukumnya terdakwa tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh membacakan putusan sela dalam sidang di ruang Prof Muhammad Hatta Ali PN Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Sebagai informasi, putusan sela merupakan keputusan majelis hakim untuk menerima atau menolak eksepsi atas dakwaan yang disampaikan seorang terdakwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, Hakim



KPK memamerkan uang senilai ratusan miliar rupiah yang disita dari Gubernur Papua Lukas Enembe di gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023). (ist)

sependapat dengan jawaban Jaksa KPK yang menilai, eksepsi Lukas Enembe telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan.

Hakim juga berpandangan, keberatan Lukas Enembe yang menilai bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang didakwakan tidak beralasan hukum. "Nota keberatan terdakwa bukan keberatan sebagaimana Pasal 151 KUHP karena telah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan," kata Hakim Rianto.

Dalam perkara ini, Gubernur nonaktif Papua itu didakwa telah menerima suap dengan total Rp 45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Menurut Jaksa KPK, uang puluhan miliar itu diterima Lukas Enembe bersama dengan mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Papua, Kael Kambuaya dan eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman. Dalam pemaparannya, Jaksa menjelaskan, uang puluhan miliar yang diduga diterima oleh Lukas Enembe berasal dari dua pihak. Pertama, sebesar Rp 10.413.929.500 dari Piton Enumbi. Piton merupakan Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia; PT Lingge-Lingge; PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Selain itu, Gubernur nonaktif Papua itu juga menerima dana sebesar Rp 35.429.555.850 dari Rijatono Lakka. Rijatono adalah Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua dan pemilik Manfaat CV Walibhu. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," papar Jaksa KPK.

Jaksa menduga, hadiah dengan total Rp 45,8 miliar itu diberikan agar Lukas Enembe selaku Gubernur

Provinsi Papua bersama anak buahnya Mikael Kambuaya dan Gerius One Yoman mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Lakka memenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022.

Sementara itu, gratifikasi yang diterima Lukas Enembe berasal dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui perantara bernama Imelda Sun. Atas perbuatannya, Lukas Enembe dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah dakwaan KPK rampung dibacakan, Lukas Enembe dan tim Penasihat Hukumnya pun langsung membacakan nota keberatan atau eksepsi. Nota keberatan sebanyak 32 poin disampaikan secara pribadi Lukas Enembe dibacakan oleh Koordinator tim Penasihat Hukumnya, Petrus Bala Pattyona. Salah satu dari puluhan keberatan yang disampaikan, Lukas Enembe memberi pesan kepada rakyatnya di Papua bahwa dirinya telah difitnah, dizalimi, dan dimiskinkan oleh KPK.

"Untuk rakyatku Papua di mana saja berada, Saya, Gubernur yang anda pilih untuk dua periode, saya kepala adat, saya difitnah, saya dizalimi, dan saya dimiskinkan," kata Lukas Enembe.

Lukas Enembe juga membantah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa itu. Ia menilai, KPK telah menggiring opini masyarakat melalui pemberitaan seolah-olah dirinya merupakan penjahat terbesar di Tanah Air. "Saya Lukas Enembe tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah menerima suap, tetapi tetap

saja KPK menggiring opini publik, seolah-olah saya penjahat besar," kata Lukas Enembe. "Saya dituduh penjudi, sekali pun bila memang benar, hal itu merupakan tindak pidana umum, bukan KPK yang mempunyai kuasa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus judi," tutur dia. (wid,rls,ant/dya)

DAFTAR 27 ASET LUKAS ENEMBE DISITA KPK DALAM KASUS TPPU

1. Uang senilai **Rp 81.628.693.000**
2. Uang senilai **USD 5.100**
3. Uang senilai **SGD 26.300**
4. 1 Unit Apartemen di Jakarta senilai **Rp 2 miliar**
5. Hotel Grand Royal Angkasa di Jayapura senilai **Rp 40 miliar**
6. 1 rumah di Jakarta seluas 682 meter persegi senilai **Rp 5,380 miliar**
7. Tanah seluas 682 meter persegi beserta bangunan di Jayapura senilai **Rp 682 juta**
8. Tanah seluas 862 m2 beserta bangunan di Kota Bogor senilai **Rp 4,3 miliar**
9. Tanah seluas 2.199 meter persegi beserta bangunan di atasnya di Jayapura senilai **Rp 1.099.500.000**
10. Tanah seluas 2.000 m² beserta bangunan diatasnya di Jayapura senilai **Rp 1 miliar**
11. 1 apartemen di Jakarta senilai **Rp 510 juta**
12. 1 apartemen di Jakarta senilai **Rp 700 juta**
13. Rumah tipe 36 di Koya Barat senilai **Rp 184 juta**
14. Sertifikat Hak Milik Tanah di Koya Koso, Abepura senilai **Rp 47,6 juta**
15. Sertifikat Hak Milik Tanah beserta bangunan berbentuk sask NTB yang rencananya dibuka sebagai rumah makan di Koya Koso, Abepura senilai **Rp 2,784 miliar**
16. 2 emas Batangan senilai **Rp 1,782 miliar**
17. 4 keping koin emas bertuliskan Property of Mr Lukas Enembe senilai **Rp 41,1 miliar**
18. 1 liontin emas berbentuk Kepala Singa senilai **Rp 34.199.500**
19. 12 cincin emas bermata batu (Harga masih proses penaksiran pegadaian)
20. 1 cincin emas tidak bermata (Harga masih proses penaksiran)
21. 2 cincin berwarna silver emas putih (Harga masih proses penaksiran)
22. Biji emas dalam 1 buah Tumbler (Harga masih proses perhitungan)
23. 1 unit mobil Honda HR-V, senilai **Rp 385.000.000**
24. 1 unit mobil Toyota Alphard, senilai **Rp 700.000.000**
25. 1 unit mobil Toyota Raize, senilai **Rp 230.000.000**
26. 1 unit Mobil Toyota Fortuner senilai **Rp 516.400.000**
27. 1 unit mobil Honda CIVIC, senilai **Rp 364.000.000**

UU Parpol Digugat, MK Diminta Batasi Masa Jabatan Ketum

JAKARTA-Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh warga Nias bernama Eliadi Hulu dan warga Yogyakarta bernama Saiful Salim. MK diharapkan mencantumkan syarat masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimum 2 periode dalam beleid itu.

Selama ini, tidak ada pembatasan masa jabatan ketua umum dalam UU Parpol. Diketahui, Permohonan ini belum diregistrasi secara resmi di MK dan dan sejauh ini baru dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) per 21 Juni 2023 nomor 65/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023.

"Sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh masa jabatan tertentu, demikian pula halnya dengan partai politik yang dibentuk atas dasar UU a quo dan juga merupakan peserta pemilu, sudah sepatutnya bagi siapa pun pemimpin partai politik untuk dibatasi masa jabatannya," tulis Eliadi dan Saiful lewat berkas permohonan, dikutip dari situs resmi MK, Senin (26/6/2023).

"(Pembatasan masa jabatan ketua umum parpol) akan menghilangkan kekuasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan," lanjut mereka.

Dalam permohonannya, mereka menggugat agar Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi: "Pergantian kepemimpinan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART." diubah menjadi: "Pergantian kepemimpinan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau

sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut."

Mereka beranggapan, parpol sebagai entitas penting dalam demokrasi, semestinya juga menerapkan salah satu asas utama negara demokrasi yaitu pembatasan masa jabatan pemimpin. Dalam permohonan itu pula, Eliadi dan Saidul menjadikan PDI-P dan Partai Demokrat menjadi contoh dari akibat ketiadaan syarat maksimum masa jabatan ketua umum parpol yang menimbulkan dinasti politik.

PDI-P sudah 24 tahun di bawah Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Sementara itu, pada kasus Demokrat, eks ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan tampuk kepemimpinan kepada putra mahkotanya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Reaksi Partai

Terpisah, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara terkait dengan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memiliki waktu maksimal hanya 2 periode. Irit bicara, Prabowo mengatakan bahwa hal tersebut akan kembali lagi terhadap aturan internal dari parpol. "Itu sesuai anggaran dasar masing-masing partai," ujarnya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/6/2023).

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron

mengatakan hal itu adalah ranah internal yang tak bisa diatur oleh negara. "Ketua umum partai itu diatur oleh statuta-nya, diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya karena ini menjadi urusan internal, menjadi urusan rumah tangga partai itu sendiri sehingga tidak bisa diatur oleh negara," kata Herman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Herman menyebut anggaran partai didanai oleh anggota masing-masing. Menurutnya, pembatasan masa jabatan ketua partai politik menjadi tak relevan. "Kehidupan berpartai juga dibiayai oleh kemampuan para anggota partainya untuk membiayai eksistensi dan berjalannya partai. Nah, oleh karenanya saya kira pembatasan akan sangat tidak relevan dengan kondisi internalnya masing-masing," tutur Herman.

Herman menyebut semestinya gugatan masa jabatan parpol itu hanya menjadi kajian bukan untuk disampaikan ke MK. Ia menganggap beda antara masa jabatan lembaga pemerintah dengan partai politik. "Kalau partai kan kekuasaannya kepada kekuasaan internal partainya yang sangat tergantung kepada para struktur yang ada di dalam partainya," sambungnya.

Ia mengatakan gugatan itu kurang relevan disampaikan ke MK. Adalah ranah partai dan internal, menurut Herman untuk menentukan seorang ketua partai politik. "Menurut saya biarkan saja ini adalah proses demokrasi yang berlangsung di internal partainya diatur oleh rumah tangga partainya sehingga betul-betul dinamika di internal partai juga tidak

kaku semuanya diatur oleh negara," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani mengatakan persoalan masa jabatan ketua parpol sebenarnya adalah open legal policy atau kebijakan yang terbuka sesuai dengan kesepakatan atau keputusan dari forum permusyawaratan parpol yang bersangkutan. Oleh karena itu, lanjut dia, dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pun, pembentuk undang-undang hingga MK tidak perlu ikut campur dengan mengaturnya.

Sebab, kata Arsul, hal itu merupakan "kontrak" di antara para pemangku kepentingan di parpol masing-masing yang juga dijamin oleh konstitusi sebagai bentuk dari kebebasan berserikat atau berorganisasi. "Nah, kalau pembentuk UU saja tidak ikut campur, maka hemat saya tidak pas juga kalau MK juga turut campur mengatur soal berapa periode orang jadi ketua parpol," tutur Arsul Sani.

Sedangkan, politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan gugatan itu sangat tidak tepat dan layak. "Sama sekali tidak layak, itu sama saja meminta negara campur tangan urusan parpol/masyarakat sipil," kata Deddy.

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar Pranowo itu mengatakan negara hanya boleh ikut campur terkait institusi atau organisasi yang merupakan perpanjangan tangan negara (state auxiliary institutions). "Kalau partai politik, itu kedaulatan anggota partai politik tersebut untuk mengatur soal kepemimpinan," terang Deddy Sitorus. (wid,rls,ist/dya)

DERETAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA

 MUHAJIMIN ISKANDAR Mulai menjabat 25 Mei 2005	 PRABOWO SUBIANTO Mulai menjabat 20 Sep 2014	 AIRLANGGA HARTARTO Mulai menjabat 13 Des 2017	 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Mulai menjabat 24 Maret 1999	 SURYA PALOH Mulai menjabat 25 Jan 2013	 HUTOMO MANDALA PUTRA Mulai menjabat 11 Mar 2018	 AHMAD SYAIKHU Mulai menjabat 05 Okt 2020	 HARY TANOESOEDIBJO Mulai menjabat 07 Feb 2015	 MUHAMMAD MARDIONO Mulai menjabat 05 Okt 2020	 GIRING GANESHA Mulai menjabat 16 Nov 2021	 ZULKIFLI HASAN Mulai menjabat 01 Mei 2015	 OESMAN SAPTA ODANG Mulai menjabat 21 Des 2016	 AGUS HARIMURTI YUDHONYONO Mulai menjabat 15 Mar 2020	 YUSRIL IHZA MAHENDRA Mulai menjabat 26 Apr 2016
													

Ratusan Bacaleg di Blitar Belum Memenuhi Syarat

BLITAR - Ratusan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di kota dan kabupaten Blitar dinyatakan belum memenuhi syarat untuk maju di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Hal itu diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyampaikan hasil verifikasi administrasi (Vermin) bacaleg.

Ratusan Bacaleg yang belum memenuhi syarat tersebut antara lain sebanyak 260 di Kota Blitar dari 360 Bacaleg dan 560 Bacaleg dari 669 Bacaleg di kabupaten Blitar. Maka bagi semua Partai yang Bacalegnya belum memenuhi syarat wajib untuk melakukan perbaikan dan pemenuhan syarat Bacalegnya agar bisa mengikuti Pileg mendatang.

Komisioner KPU Kota Blitar, Divisi Teknis Penyelenggara, Hernawan M Khabib menyebut, 260 Bacaleg yang belum memenuhi syarat itu berasal dari semua partai politik yang akan ikut kontestasi Pileg mendatang.

“Secara garis besar semua Parpol melakukan perbaikan cuman untuk jumlah Bacalegnya untuk perbaikan hampir semuanya kurang lebih 75 persen,” ucap Khabib, dikutip dari beritajatim.com, Senin (26/6/2023).

Mayoritas Bacaleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat ini

memiliki permasalahan dalam kelengkapan berkas. Selain itu ada pula kesalahan dalam pengisian silon dengan berkas yang diberikan waktu pendaftaran.

“Ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki oleh masing-masing Bacaleg. Semisal Bacaleg harus menggugah KTP (Kartu Tanda Penduduk) tapi justru yang diunggah KK (Kartu Keluarga),” ucapnya.

Banyaknya Bacaleg yang belum memenuhi syarat akibat kurang lengkapnya dokumen, kemungkinan diakibatkan oleh kurang telitinya partai politik. Selain itu waktu pendaftaran yang terlalu mepet dengan waktu penutupan, juga membuat para partai politik kurang memperhatikan kelengkapan syarat pencalonan.

Menurut Khabib, mayoritas partai politik mengeluhkan lamanya waktu pengurusan surat-surat persyaratan Bacaleg, seperti surat keterangan sehat hingga surat dari Pengadilan.

“Bahwa ketika pengajuan Bacaleg lalu, ada 2 yang harus dipenuhi oleh partai politik. Pertama dia harus melengkapi syarat administratif, kemudian partai politik juga harus menggugah ke Silon. Dua hal itulah yang harus dilakukan partai politik, dan masing-masing ini terbatas waktu,” papar Khabib.

Meski 75 persen Bacaleg di Kota Blitar belum memenuhi syarat, namun 17 partai politik yang mengusung mereka masih bisa melakukan upaya perbaikan. KPU Kota Blitar pun memberikan kesempatan kepada Parpol untuk melakukan perbaikan sebelum tanggal 9 Juli 2023.

Nantinya setelah dilakukan perbaikan, KPU Kota Blitar akan melakukan pemeriksaan kembali mengenai berkas yang diajukan. Setelah dinyatakan lengkap maka barulah KPU Kota Blitar akan memasukkan nama Bacaleg yang bersangkutan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).

“Nanti sebelum diumumkan maka akan kami cek ulang apakah ini sudah selesai. Apakah ini sudah cukup bersama dengan Partai politik. Kalau sudah cukup nanti ketika di DCS akan kami umumkan,” ujarnya.

Dalam tahap DCS, KPU Kota Blitar masih membuka masukan dari masyarakat. Nantinya masyarakat bisa memberikan saran atau pun informasi mengenai bakal calon legislatif yang telah ditetapkan KPU masuk kedalam daftar calon sementara.

Diharapkan dengan begitu, Bacaleg yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) benar-benar telah memenuhi syarat. “Bisa jadi setelah kami umumkan masyarakat bisa memberikan tanggapan. Hal itu bisa menjadi masukan bagi yang kami umumkan,”



pungkasnya.

Jumlah Bakal Calon Legislatif yang mendaftar di KPU Kota Blitar sendiri mencapai 360 orang, dimana 75 persennya dinyatakan belum memenuhi syarat.

Sementara, KPU Kabupaten Blitar menyatakan 560 Bacaleg belum memenuhi syarat. Jumlah tersebut merupakan bacaleg dari 17 parpol peserta Pemilu 2024. KPU Blitar telah menyampaikan hasil verifikasi berkas Bacaleg ke 17 Partai Politik. Hasilnya dari 669 Bacaleg, 560 di antaranya dinyatakan belum memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Blitar dan baru 109 Bacaleg yang memenuhi syarat.

Dari hasil tahapan verifikasi, diketahui dari 17 partai politik yang akan ikut kontestasi Pileg di Kabupaten Blitar 2024 mendatang, belum ada satu Parpol pun yang dinyatakan 100 persen Bacalegnya memenuhi syarat. Artinya seluruh partai politik di Kabupaten Blitar masih harus melakukan perbaikan dan pelengkapan berkas bacaleg.

“Ini semua sudah kami verifikasi bacaleg yang ms 109 dan yang bms 560 dan berarti di masa perbaikan ini mereka harus melakukan perbaikan,” kata Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nikmatius Sholihah, dikutip dari beritajatim.com, Sabtu (24/6/2023)

Secara keseluruhan jumlah bacaleg yang telah mendaftar ke KPU Kabupaten Blitar adalah 669 orang. Dengan rincian bacaleg laki-laki berjumlah 386, serta perempuan 283 orang.

Namun dari ratusan Bacaleg yang mendaftar tersebut yang dinyatakan memenuhi syarat kurang dari 25 persen saja. Ada Berbagai faktor yang membuat ratusan bakal calon legislatif dinyatakan belum memenuhi syarat untuk pendaftaran oleh KPU Kabupaten Blitar.

Mulai dari kurangnya berkas hingga tidak sesuai identitas dari Bacaleg. Dari hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Blitar diketahui masih banyak sejumlah bakal calon legislatif yang belum

memenuhi syarat keterangan sehat maupun bebas narkoba.

Selain itu ada pula Bacaleg yang belum melengkapi berkas identitasnya seperti ijazah yang dilegalisir. Ada pula identitas Bacaleg yang berbeda dengan unggahan parpol di Silon.

“Jadi semua indikator, dari isian di Silon itu ya mulai nama, pekerjaan, usia kami sandingkan dengan unggahan dokumen yang disampaikan oleh partai politik yang berupa KTP elektronik, apakah sesuai dengan usia, nama dengan KTP elektroniknya,”

“Kemudian kita cek juga dari BB bakal calon apakah sudah tercengang apakah ada pekerjaan yang harus mundur,” jelasnya.

Selain itu ada pula bakal Calon Legislatif yang terdaftar ganda di 2 partai politik yang berbeda. Bacaleg ini dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai politik yang memiliki Bacaleg ganda harus melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Hal ini demi memastikan bacaleg tersebut memilih satu partai politik dalam kontestasi pileg 2023 mendatang.

“Ya ada yang ganda juga jadi partai politik harus mengkonfirmasi yang bersangkutan memilih partai yang mana seperti itu kemudian berkasnya diserahkan kepada kami untuk dalam proses perbaikan,” imbuhnya

Meski banyak yang belum dinyatakan memenuhi syarat, namun 17 partai politik yang ada di Kabupaten Blitar bisa melakukan perbaikan. Tahapan perbaikan akan dibuka oleh KPU Kabupaten Blitar mulai tanggal 29 Juni hingga 9 Juli 2023 mendatang.

Dengan panjangnya masa perbaikan diharapkan pihak Parpol bisa segera memperbaiki dan melengkapi berkas bacaleg yang masih kurang.

“Mulai tanggal 29 hingga tanggal 9 Juli adalah masa tahapan perbaikan jadi partai politik bisa melakukan perbaikan bacaleg yang belum memenuhi syarat,” tandasnya. (lut/dya)



Secara garis besar semua Parpol melakukan perbaikan cuman untuk jumlah Bacalegnya untuk perbaikan hampir semuanya kurang lebih 75 persen,”

HERNAWAN M KHABIB

Komisioner KPU Kota Blitar,
Divisi Teknis Penyelenggara



BP2MI Tetapkan 550 Orang Sebagai Tersangka Kasus TPPO

SURABAYA – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin marak. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, mengklaim saat ini sudah ada 550 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan itu dilakukan dalam kurun waktu tiga minggu terakhir atau sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Gugus Tugas (Satgas) Penanganan TPPO.

"Kerja gugus tugas sudah sangat nyata, gerakannya sampai di level bawah. Per hari ini 550 tersangka sudah ditetapkan dan kurang lebih 1.647 anak bangsa yang hampir dijual ke luar negeri itu sudah diselamatkan. Saya yakin jika konsisten gugus tugas ini bekerja," kata Benny di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip dari tempo.co, Senin (26/6/2023).

Benny menyebut Kapolri saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus TPPO dan kejahatan lainnya yang berhubungan dengan TPPO. Benny menyebut BP2MI juga turut membantu Listyo Sigit untuk mengungkap kasus tersebut.

"Nama-nama bandar sudah kita serhakan ke pihak kepolisian dan pasti dalam proses pendalaman dan saya berkeyakinan akan segera ditangkap," kata Benny.

Sementara itu, dalam pengungkapan tersebut, satgas TPPO menyebutkan adanya beberapa modus yang dilakukan, diantaranya dengan memberi mengiming-imingi bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Salah satu kasus yang diungkap dengan modus tersebut diungkap Polres Brebes, Polda Jawa Tengah. Korban dijanjikan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) dengan gaji yang tinggi.

Namun kenyataannya, korban hanya berada di penampungan dan selanjutnya di jual ke Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Selama bekerja di Arab Saudi, korban tidak menerima gaji serta dipekerjakan tanpa mengenal waktu. Korban pun minta dipulangkan ke Indonesia, namun baru dipulangkan setelah membayar Rp20 juta.

Kasus lainnya dengan modus mengiming-imingi kerja di luar negeri juga diungkap Polres Boyolali, Polda Jateng. Korban diiming-imingi bekerja sambil kuliah dengan gaji SGD 2.700 per bulan. Namun pada kenyataannya empat korban yang telah membayar sejumlah uang tak kunjung diberangkatkan. Akhirnya salah satu korban diberangkatkan namun di sana korban tak sesuai kenyataan yang dijanjikan pelaku.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan pun mengingatkan masyarakat untuk tak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi bekerja di luar negeri. Ia juga meminta masyarakat tak mudah membayar sejumlah uang

untuk bekerja di luar negeri.

"Masyarakat harus waspada dan hati-hati. Lebih baik gunakan jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri agar terjamin keamanan, hak dan lainnya," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari okezone.com, Sabtu (24/6/2023).

Ramadhan mengungkap-kan bahwa sejak dibentuk Satgas TPPO, hingga kini sudah menangani sebanyak 511 Laporan Polisi (LP). Dari ratusan LP tersebut, sebanyak 598 tersangka telah dibekuk.

Ramadhan menuturkan, berbagai macam modus para tersangka menjerat para korban TPPO. Terbanyak yakni mengiming-imingi korban bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Modus ini tercatat ada 386 kasus.

Modus lainnya yang terbanyak yakni para korban dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Angka dalam kasus ini yakni sebanyak 136. Dua modus lainnya TPPO ini yakni mempekerjakan korban sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan 6 kasus dan eksploitasi anak sebanyak 34 kasus.

"Dari ratusan kasus yang ditangani Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda jajaran, telah menyelamatkan korban sebanyak 1.744," kata Ramadhan.

Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci ada 777 korban perempuan dewasa dan 99 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 819 dan laki-laki anak ada 49 orang.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 100 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 384 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 20 Juni 2023.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara, yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Ia pun berjanji akan melindungi dan menjaga WNI dari korban TPPO.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan mendukung usaha BP2MI dalam melindungi para pekerja



migran. Erick juga mendorong BNI 46 untuk mendata para pekerja yang berada di luar negeri. Palsanya, sebagian besar pekerja migran menggunakan jasa bank plat merah tersebut untuk mengirim uang ke keluarganya di Indonesia.

"Kita tahu yang seperti ketua sampaikan ke ruangan saya waktu itu, dari 9 juta pekerja migran ini hanya 50 persen yang terdaftar secara resmi, sehingga ini lah kenapa terjadi hal-hal yang kita (tidak) inginkan. Tentu kita harus keras terhadap perdagangan manusia, apa lagi tidak ada proteksi terhadap pekerja migran," kata Erick, dikutip dari tempo.co, Senin (26/6/2023).

Lebih lanjut, Erick mengaku pernah menyaksikan langsung para pekerja migran di Istanbul Turki. Salah seorang pekerja yang Erick temui dalam keadaan pincang. Ia kemudian bertanya apakah ada asuransi di tempat pekerja itu bekerja dan jawabannya tidak.

"Lalu kondisinya gimana? Dia diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kecelakaan itu terjadi di tempat bekerja, hal-hal ini yang saya rasa, tadi disampaikan, bahwa sesuai dengan kerja sama kita. Kita akan terus meningkatkan bagaimana proteksi terhadap pekerja migran," kata Erick.

Sementara itu, Polda Jatim juga berhasil membongkar kasus TPPO. Setidaknya ada empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka itu adalah; Yeti Sofiah (40) warga Jember; Saiful Khalik (48), Banyuwangi; Febri (41), Lampung dan Rico Thomas (38), PNS di Kota Medan.

Mereka menyelundupkan tujuh warga negara Indonesia (WNI) ke Thailand dan Myanmar. Perbuatan itu terjadi sejak 18 Oktober 2022 hingga Juni 2023. Akibat perbuatan itu, para tersangka terancam pidana penjara

paling lama 15 tahun.

Dirkripsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan, kasus ini mulanya terungkap dari media sosial. Menunjukkan para korban berada di Thailand. Melalui medsos, mereka meminta bantuan kepada Presiden RI. Para korban yang berada di Myanmar ingin dipulangkan. "Kemudian pihak istana menghubungi Mabes Polri, lalu kami dihubungkan untuk melakukan pengungkapan," ungkap Farman saat konferensi pers di Polda Jatim, Senin (26/6/2023).

Farman menjelaskan, modus yang ditawarkan kepada para korban ini adalah bekerja dengan mendapat bayaran 800 USD per bulan. Kalau di rupiahkan sekitar Rp 12 juta. Korban-korban itu juga dijanjikan fasilitas. Beruba makan dan tempat tinggal selama di sana. Selain itu, pekerjaan yang ditawarkan adalah translator yang bekerja di kantor.

Sebelum diberangkatkan, para korban dipaksa menyerahkan uang Rp17 juta hingga Rp20 juta. Katanya untuk mengurus berkas PMI dan akomodasi. Faktanya, para korban dipekerjakan sebagai agen cyber scam atau penipu investasi online. Mereka ditarget mendapatkan pelanggan setiap hari.

"Jika tidak memenuhi target, maka dihukum dengan ancaman potong gaji dan kekerasan fisik dari yang mempekerjakan mereka," ungkap Farman.

Sedangkan peran dari tersangka; Yeti dan Saiful adalah perekrut. Sementara Febri adalah agen pertama. "Tersangka Rico mengkondisikan agar Calon PMI tidak kesulitan masuk di loket Imigrasi," paparnya.

Kini, keenam korban TPPO itu sudah dipulangkan dan sudah berada di Jawa Timur. Tinggal satu yang masih berada di Myanmar. Proses pemulangan masih dilakukan. (lut/dya)



LAKSMI DE-NEEFEE

Perlu Kurikulum Isu Perubahan Iklim

PUTERI Indonesia 2022 Laksmi De-Neeffe Suardana percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu langkah utama untuk melawan perubahan iklim. Oleh sebab itu, sekolah perlu menerapkan kurikulum mengenai isu perubahan iklim.

"Education is sustainability, sustainability is education," kata Laksmi saat menghadiri media briefing Indonesia Net-Zero Summit 2023 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta.

Laksmi merasa beruntung, sejak SMP, pendidikan yang dia dapat berbasis internasional dan menerapkan kurikulum isu perubahan iklim.

Menurut dia, kurikulum tentang perubahan iklim sangat penting untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Apalagi, banyak anak muda yang saat ini cemas terhadap masa depan mereka.

"Pendidikan sebenarnya langkah pertama saya untuk berkontribusi sebagai anak muda untuk melawan perubahan iklim," ujar Laksmi.

Puteri Indonesia 2022 ini lebih banyak fokus pada isu pendidikan. Namun, setelah selesai menjabat sebagai Puteri Indonesia, ia lebih tertarik untuk fokus terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Menurut Laksmi, banyak masyarakat Indonesia yang masih sulit menerapkan hal dasar terkait lingkungan, seperti pemilahan dan pengolahan sampah dengan metode reduce (mengurangi), reuse (menggunakan ulang), dan recycle (mendaur ulang). Salah satu faktor sulitnya hal tersebut ialah kebiasaan dan faktor pendidikan.

Laksmi sadar akan isu perubahan iklim karena ia tumbuh dan hidup di Bali.

Ia mengatakan, masyarakat di Bali hidup dengan mengedepankan filosofi keseimbangan antara hubungan spiritual, lingkungan, dan sesama manusia.

Selain itu, Laksmi juga pernah tinggal di Australia sejak berusia 16 tahun. Australia merupakan negara yang menerapkan aturan ketat terkait sampah. Oleh sebab itu, ia terbiasa menerapkan konsep pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam berkomitmen untuk fokus pada isu keberlanjutan lingkungan, Laksmi menerapkannya pada setiap

aktivitas yang dilakukan, bahkan mulai dari fashion hingga bisnis.

Apa pun yang ia lakukan harus bergerak ke arah sustainability (keberlanjutan) karena hal tersebut merupakan masa depan.

"Bisa dimulai dari hal kecil, misal ke supermarket bawa tas belanja sendiri, jangan mengandalkan kantong plastik. Kalau tidak dari sekarang mengikuti atau mengimplementasikan keberlanjutan, kita akan menjadi yang terbelakang," kata perempuan 27 tahun tersebut.

Laksmi pun mengajak semua orang, khususnya generasi muda, untuk menerapkan gaya hidup keberlanjutan. Sebab, gaya hidup berkelanjutan tidak hanya menimbulkan hal baik pada diri sendiri, tetapi juga masyarakat luas.

Profil

Laksmi lahir di Ubud, Gianyar, Bali pada 26 Januari 1996. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Ayah Laksmi, Ketut Suardana berasal dari Bali, sementara ibunya, Janet De-Neeffe adalah orang Australia.

Pada tahun 2014 hingga 2016, ia mengenyam pendidikan di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia dan mendapatkan gelar Bachelor of Design Honours in Fashion Design.

Selanjutnya, ia mengenyam pendidikan di Politecnico Internazionale della Moda (Polimoda), Italia, dan mendapatkan gelar Bachelor of Business Marketing in Fashion Business.

Laksmi juga mendapatkan gelar Diploma of Arts di Monash College. Sebelum mengikuti kontes kecantikan Puteri Indonesia 2022, Laksmi pernah muncul menjadi cameo di film biografi Eat Pray Love (2010).

Saat itu proses syuting memang dilakukan di restoran milik keluarga De Neeffe. Kontes kecantikan pertama yang diikuti Laksmi adalah Puteri Bali pada 2022.

Sebelum ikut berkompetisi,

Laksmi memantapkan diri mendalami dunia kecantikan dengan bergabung ke Ratu Sejagad, kamp kecantikan yang diikuti oleh Puteri Sumatera Barat 2020, Louise Kalista Iskandar.

Laksmi mengikuti audisi terbuka Puteri Bali 2022 dan sukses keluar sebagai pemenang. Selanjutnya ia mewakili provinsi Bali ke kontes Puteri Indonesia 2022.

Laksmi sukses mengalahkan 43

kontestan dari berbagai provinsi di Indonesia dan dinobatkan sebagai pemenang Puteri Indonesia 2022 (Kompas)



Pendidikan sebenarnya langkah pertama saya untuk berkontribusi sebagai anak muda untuk melawan perubahan iklim,"

LAKSMI DE-NEEFEE

MENGENAL SERANGAN JANTUNG HINGGA TIPS PENCEGAHAN

SERANGAN jantung merupakan salah satu kondisi medis yang serius, yang memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia setiap tahunnya.

Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2018, prevalensi penderita jantung siaga di Indonesia sebesar 1,4 persen dari total populasi, atau sekitar 3,2 juta orang yang didiagnosis menderita jantung siaga yang bisa saja menjadi serangan jantung.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Kardiologi Intervensi Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Cinere dr. Sidhi Laksono Purwowyoto, Sp.JP (K), FIHA, menyebutkan jika serangan jantung adalah kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke jantung terhenti atau terputus, biasanya karena penyumbatan pembuluh darah jantung yang disebut arteri koroner.

Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otot jantung dan jika tidak segera ditangani, dapat mengancam nyawa seseorang.

"Gejala serangan jantung dapat bervariasi, tetapi yang paling umum termasuk nyeri dada, sesak napas, mual, dan kelelahan yang tak terduga," ujar Sidhi, Minggu.

FAKTOR PENYEBAB

Sebagian orang beranggapan bahwa berolahraga secara berlebihan

dapat berakibat serangan jantung, namun menurut dokter yang menempuh pendidikan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Indonesia ini menyebutkan bahwa faktor utamanya adalah gaya hidup yang tidak sehat.

Mulai dari pola makan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, faktor stres kronis juga mendukung peningkatan tekanan darah dan membuat jantung seseorang bekerja lebih keras untuk memompa darah.

"Orang yang kelebihan berat badan atau obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami serangan jantung karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh.

Hal ini dapat diperparah jika seseorang memiliki kondisi medis seperti diabetes, kolesterol tinggi, ataupun masalah kesehatan," ujarnya Sidhi lebih lanjut.

PENCEGAHAN

Untuk mencegah serangan jantung, berikut merupakan beberapa tips yang dapat dilakukan agar seseorang dapat meminimalisir dan membantu dalam pencegahan terkena serangan jantung:

1. Berolahraga secara teratur

Berolahraga secara teratur dapat

membantu memperkuat jantung dan meningkatkan kemampuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Disarankan untuk melakukan olahraga aerobik seperti berjalan cepat, berlari, berenang, atau bersepeda, selama setidaknya 30 menit sehari, sebanyak 3-5 kali seminggu.

2. Mengonsumsi makanan yang sehat

Mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya serat, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Hindari makanan yang tinggi lemak dan kolesterol seperti makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

3. Menjaga berat badan yang sehat

Kegemukan atau obesitas dapat meningkatkan risiko jantung siaga. Oleh karena itu, menjaga berat badan yang sehat melalui diet sehat dan olahraga teratur sangat penting untuk mencegah jantung siaga.

4. Menghindari kebiasaan merokok

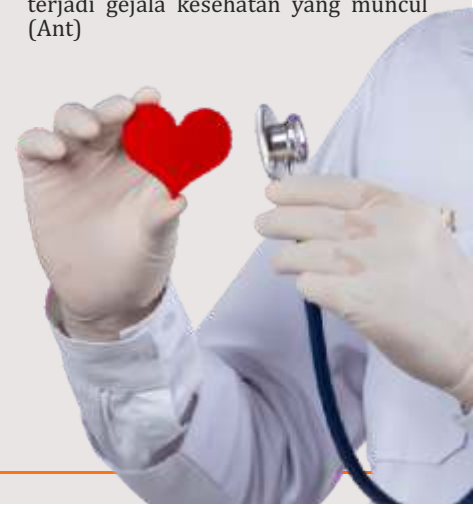
Merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko jantung siaga. Jika Anda merokok, segeralah untuk berhenti merokok.

5. Mengurangi jumlah konsumsi alkohol

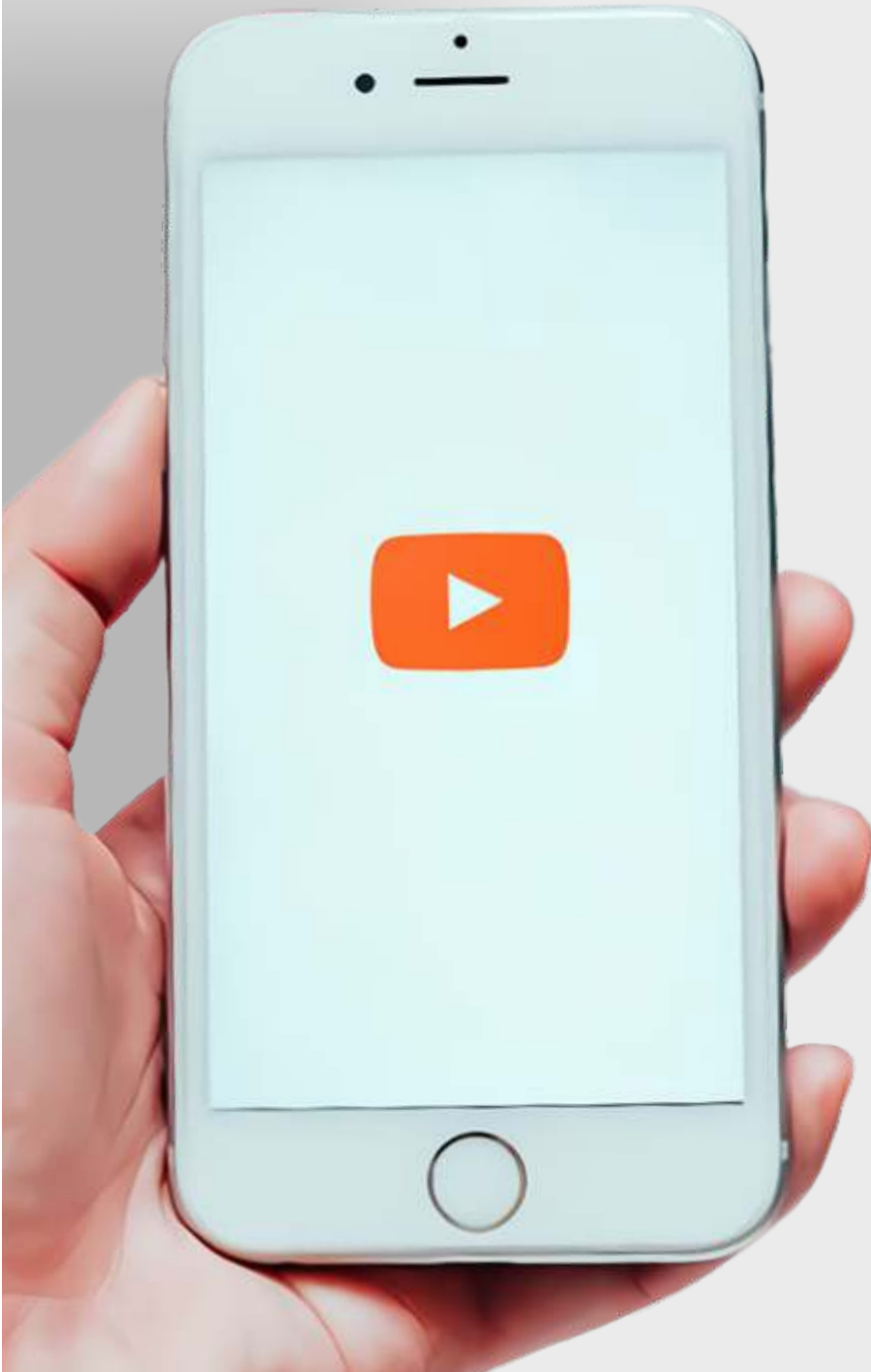
Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko jantung siaga. Disarankan untuk hanya mengonsumsi alkohol dalam jumlah sedang atau kurang, dan sebaiknya menghindari minuman beralkohol jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung.

Menjalani gaya hidup yang sehat membantu mencegah jantung siaga dan menjaga kesehatan jantung secara keseluruhan, meskipun faktor risiko lain seperti kondisi medis, faktor keturunan atau paparan lingkungan yang tinggi belum bisa dikontrol.

Untuk itu penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan berkonsultasi dengan dokter jika terjadi gejala kesehatan yang muncul (Ant)



YOUTUBE KEMBANGKAN FITUR GIM



PLATFORM tayangan video milik Google, Youtube sedang melakukan uji coba internal terhadap sebuah produk terbarunya untuk bermain gim daring.

Adapun uji coba ini dilakukan untuk mendorong adanya pertumbuhan pengguna baru.

Dilansir dari Reuters, Minggu (25/6/2023) informasi tersebut tersebar setelah adanya surel yang dikirimkan kepada karyawan di perusahaan induknya, Google.

Dalam surel tersebut perusahaan mengundang karyawan untuk menguji produk baru yang disebut 'Playables'. Beberapa gim yang tersedia untuk pengujian termasuk game arcade Stack Bounce.

Gim-gim tersebut dapat dimainkan melalui laman YouTube menggunakan web pencarian atau melalui perangkat dengan sistem operasi Google Android dan Apple iOS, seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut.

Seorang juru bicara YouTube menyatakan bahwa gim telah lama menjadi fokus platform ini.

Perusahaan sedang bereksperimen dengan fitur-fitur baru, tetapi saat ini belum ada pengumuman resmi yang dapat dibagikan.

Dalam laporan yang diterbitkan Wall Street Journal, CEO Youtube, Neal Mohan tengah memutar otak untuk mengatasi perlambatan belanja iklan pada platformnya.

Untuk itu, pengembangan platform untuk hosting gim daring merupakan menjadi salah satu bagian dari upaya untuk mencari pertumbuhan baru dalam menghadapi perlambatan belanja iklan.

YouTube telah menjadi tempat populer bagi pengguna untuk melakukan siaran langsung gim dan menonton cuplikan gim yang disiarkan langsung.

Dengan memperluas fitur bermain gim secara daring, Youtube berharap dapat menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan keterlibatan pengguna dalam berbagai bentuk konten.

Meskipun belum ada tanggal peluncuran resmi yang diumumkan, langkah ini menunjukkan komitmen YouTube dalam menghadirkan

pengalaman yang lebih beragam dan menarik bagi penggunanya.

Pengertian gim daring merupakan sebuah jenis permainan yang hanya bisa dimainkan apabila perangkat yang digunakan untuk bermain game terkoneksi dengan jaringan internet.

Jadi, jika seseorang ingin bermain game online, maka perangkat yang dia gunakan harus terhubung dengan jaringan internet.

Jika tidak terhubung, maka game online tersebut tidak bisa dimainkan.

Biasanya game online memungkinkan satu pemain (player) game untuk dapat saling terhubung dengan pemain yang lain.

Sehingga hal tersebut dapat memungkinkan pemain satu dengan pemain yang lainnya saling berkontak, baik itu dalam bentuk permainan (seperti pukul-memukul, kejar-kejaran, dan lain-lain) atau bisa juga saling berkiriman pesan.

Tentunya hal itu mirip seperti layanan pada layanan sosial media.

Umumnya permainan yang dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan oleh penyedia jasa online dan disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online.

Terdapat banyak jenis Permainan online, dari mulai permainan sederhana berbasis teks sampai permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang dapat dimainkan oleh banyak pemain sekaligus. (Berbagi Sumber)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KETAHUI, SEBERAPA SERING MENCUCI HANDUK UNTUK MANDI

HANDUK mandi adalah sesuatu yang digunakan setiap hari dan berisiko terkontaminasi oleh beberapa patogen, seperti patogen kulit, bakteri, virus, hingga jamur.

Ketahui frekuensi mencuci handuk mandi yang tepat agar terhindar dari patogen penyebab gangguan kulit.

Dalam kasus yang lebih ekstrim, handuk kotor sebenarnya dapat menyebarkan bakteri yang terkait dengan MRSA, yang merupakan infeksi staph berbahaya yang sulit diobati dengan antibiotik," tutur Chimento.

Jadi, agar handuk Anda bebas bakteri dan makhluk menyeramkan lainnya sebaiknya cuci handuk secara terpisah. Mencampurnya dengan pakaian lain dapat menyebabkan penyebaran kuman.

Melalui everydayhealth.com, profesor dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Arizona Zuckerman di Amerika Serikat dr. Kelly Reynolds, PhD mengatakan jumlah terbaik untuk mencuci handuk mandi adalah setiap kali digunakan.

Namun, penggunaan handuk dapat mengganggu maksimal tiga kali sebelum dicuci, asalkan handuk dikeringkan dan tidak lembab.

"Praktik terbaik adalah mencuci handuk setelah setiap kali digunakan," kata dr. Reynolds.

Aturan terpenting adalah mengeringkan handuk setelah digunakan. Proses pengeringan membantu untuk membunuh mikroba potensial (dan menghentikannya berkembangbiak).

Meski demikian, pengeringan handuk juga bergantung pada iklim di Indonesia. Iklim Indonesia yang tropis dan cenderung panas memudahkan handuk cepat kering dan dapat digunakan lebih dari sekali.

Pastikan handuk dijemur di luar kamar mandi karena kamar mandi adalah area yang lebih lembab dibandingkan area lain di rumah.

Ada satu aturan yang mengharuskan penggantian handuk setiap kali digunakan atau hanya sekali pakai.

Aturan tersebut jika di bagian tubuh terdapat luka terbuka atau baru melakukan tindakan operasi dan masalah kulit lainnya. Jika mengalami hal-hal tersebut, handuk mandi harus lebih sering diganti.

"Penghalang kulit Anda tidak utuh, jadi harus

hati-hati," kata salah satu pendiri Audubon Dermatology di New Orleans, Deirdre Hooper, MD.

Cara mencuci handuk yang tepat

Menurut dr. Reynolds, cuci handuk dengan air panas dan detergen, lalu keringkan dengan uap panas atau suhu tinggi agar jamur dan kuman lebih cepat mati.

Idealnya, pilihlah detergen yang mengandung enzim yang dirancang untuk mengurai kotoran dan membunuh kuman (Label depan sering mengatakan bahwa deterjen memiliki enzim pelawan noda).

Jika memiliki kulit sensitif, produk baru dapat menyebabkan iritasi. Oleh sebab itu, hentikan penggunaan jika kulit mengalami reaksi negatif saat menggunakan detergen yang mengandung enzim.

Pilihlah detergen bebas pewarna dan pewangi serta memasukkan enzim ke dalam formulasinya.

Hindari pelembut kain dan lembaran pengering seperti wabah. Keduanya dapat meninggalkan residu yang memengaruhi daya serap handuk. Plus, residu itu dapat berkontribusi pada retensi bau dan meninggalkan Anda dengan handuk bau.

Saat ingin mengeringkannya, gantung handuk dengan benar. Bahkan, untuk handuk yang akan digunakan kembali pun harus digantung dan jangan ditumpuk dengan handuk atau pakaian lainnya setelah digunakan.

Selain itu, sedapat mungkin jangan berbagi handuk mandi dengan orang lain. Jangan lupa untuk mencuci mesin cuci secara berkala atau sebulan sekali dengan menambahkan pemutih pakaian agar patogen dari penggunaan mesin cuci tidak berpindah ke handuk mandi (Ant)



Praktik terbaik adalah mencuci handuk setelah setiap kali digunakan"

dr. Kelly Reynolds, PhD

Profesor dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Arizona Zuckerman di Amerika Serikat



Hoax Sistem Pemilu ... (dari hal 1)

BARESKRIM Polri mengaku telah menaikkan status perkara laporan dugaan ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) dengan terlapor Denny Indrayana ke tahap penyidikan. Laporan itu bertalian dengan pernyataan Denny yang sempat mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan uji materi soal sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur di UU Pemilu.

"Sudah ditangani oleh Pak Direktur Tindak Pidana Siber (Brigjen Adi VIVID), sudah tahap penyidikan masih berproses," ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers, Senin (26/6).

Dengan peningkatan status tersebut, artinya penyidik telah menemukan dugaan unsur pidana di kasus yang menyeret Denny Indrayana. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini.

Agus mengatakan saat ini polisi masih memerlukan keterangan sejumlah ahli sebelum melakukan gelar perkara. Ia menambahkan polisi juga mengusut dugaan perbuatan keonaran yang dilakukan Denny dalam kasus itu.

"Masih berproses, kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi unjuk rasa, apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak, nanti keterangan ahli yang menentukan. Jadi masih berproses," katanya.

Selain itu, Agus juga mengaku sudah memerintahkan Brigjen Adi VIVID dan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro untuk segera menuntaskan perkara ini.

Denny Indrayana resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Andi Windo Wahidin pada Rabu (31/5). Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri. Denny yang merupakan pakar hukum tata negara itu dilaporkan atas dugaan atas tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.

Laporan terhadap Denny dilayangkan buntut pernyataannya yang mengklaim dapat bocoran informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan sistem pemilu dan mengembalikannya menjadi sistem proporsional tertutup. Namun, pada sidang pembacaan putusan pada Kamis (15/6/2023), hakim MK menolak gugatan perubahan sistem pemilu dan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.

Didampingi 45 Pegiat Hukum

Terlapor Denny Indrayana, yang diwakili tim kuasa hukumnya, buka suara. Denny telah menunjuk tim kuasa hukum di antaranya Bambang Widjojanto, Defrizal Djamaris, A. Andi

Asrun, hingga Muhammad Razif Barokah. Tim kuasa hukum menyebut tujuan Denny menyebarkan isu itu disebut hanya untuk mengadvokasi putusan MK.

"Tujuan utama dari Prof. Denny Indrayana menyampaikan pandangannya melalui Twitter adalah dalam rangka mengadvokasi putusan Mahkamah Konstitusi yang begitu penting bagi wajah demokrasi Indonesia. Kami mengucapkan syukur bahwa tujuan advokasi tersebut telah tercapai," kata kuasa hukum Denny Indrayana dalam keterangan, Senin (26/6/2023).

Tim kuasa hukum menilai penyampaian Denny Indrayana ini tak terlepas dari peran kliennya sebagai seorang profesor. Denny disebut sempat mendapat sinyal negatif terkait hasil keputusan MK. "Beliau sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dan Konstitusi, menangkap adanya sinyal negatif dan berbahaya, ditambah preseden-preseden yang dilakukan MK dalam putusan-putusan sebelumnya, maka beliau memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan peringatan kepada publik," sambungnya.

Tim kuasa hukum menyebut puluhan aktivis dan pegiat hukum akan menandatangani surat kuasa untuk memberikan pendampingan. "Apa yang dihadapi oleh Prof. Denny Indrayana saat ini adalah bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), sebuah langkah mengajukan tuntutan hukum terhadap masyarakat yang berpartisipasi secara kritis terhadap dinamika negara," ujarnya.

Ia menyinggung terkait keputusan MK yang mengklasifikasikan sikap Denny Indrayana ke dalam ranah etik. Menurutnya kasus Denny tak masuk tindak pidana. "Apa yang disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana bukan merupakan tindak pidana dan sangat tidak pantas untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum. Karena yang beliau lakukan adalah menjalankan hak kebebasan berpendapat serta kewajiban sebagai guru besar hukum tata negara dan konstitusi," kata kuasa hukum.

Sentil Anak Presiden

Belum berhenti di situ, Denny Indrayana, kembali menyerukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam argumentasinya, Denny menjabarkan setidaknya tiga alasan mengapa Jokowi harus dimakzulkan.

Mantan Wamenkumham itu mengajak masyarakat untuk berpikir lebih sehat. Pasalnya, kata dia, saat ini sudah banyak logika yang bengkok. "Kita harus berpikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal, mengatakan Kaesang tidak membangun dinasti karena beda Kartu Keluarga dengan Jokowi. Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep," katanya, dikutip dari akun Twitternya, Senin (26/6/2023).

Selanjutnya, dia menjabarkan 3 pelanggaran Jokowi hingga pantas dimakzulkan. Pertama, Jokowi diduga melakukan korupsi memperdagang-

kan pengaruh. "Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidillah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres. Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar rupiah," terangnya.

Modal besar itu, menurut Denny, tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi. Dia berpendapat, yang terjadi adalah modus trading in influence, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai Presiden.

Kedua, Jokowi diduga menghalang-halangi proses penegakan hukum. "Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elite politik. KPK siap mentersangkan dengan seizin Presiden. Sampai saat ini sang elite tetap aman karena berada dalam barisan koalisi Jokowi," cuitnya.

Permasalahan ketiga, terang Denny, adalah pembiaran Jokowi terhadap orang terdekatnya, Moeldoko, yang dinilai akan membegal Partai Demokrat. "Moeldokogate bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan. pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara," katanya.

"Dengan tiga delik pelanggaran impeachment yang kasat mata di atas,

DPR bukan tidak mampu (unable) untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau (unwilling)," pungkasnya.

Terpisah, Gerindra mengkritik pernyataan eks Wamenkumham Denny Indrayana soal pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Waketum Gerindra Habiburokham menganggap pernyataan Denny racun bagi demokrasi. "Pernyataan Denny Indrayana bukan hanya tidak benar, tapi juga racun bagi demokrasi," kata Waketum Gerindra Habiburokham kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

Menurut Habiburokham, pernyataan Denny soal pemakzulan itu tidak berdasar. Dia menilai Denny-lah yang seharusnya membuktikan tuduhannya itu. "Pernyataan tersebut disampaikan tanpa bukti sama sekali, ini menjungkirbalikkan azas hukum yang sehat bahwa orang yang mendalilkan apalagi menuduhkan haruslah menanggung beban pembuktian," ujarnya.

Habiburokham mengingatkan Denny tak menyerang pihak lain karena berbeda kepentingan politik. Dia menyarankan Denny menyampaikan pernyataan dengan dasar yang kuat. "Kami mengingatkan kepada Denny bahwa sebagai aktivis kita jangan hanya membabi buta mengedepankan kepentingan politik dengan menyerang pihak yang berbeda kubu. Tapi kita harus juga mengedukasi publik dengan hanya menyampaikan pernyataan yang berdasar," katanya. (wid,rls,ant,kum/dya)

45 NAMA YANG SIAP MENDAMPINGI DENNY INDRAYANA:

1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H.
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
3. Haris Azhar, S.H., M.A.
4. Dorel Almir, S.H., M.Kn.
5. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
6. Dr. Heru Widodo, S.H., M.H.
7. Defrizal Djamaris, S.H.
8. Usman Hamid, S.H., M.Si.
9. Febri Diansyah, S.H.
10. Tatak Prapti Ujijati, S.H., M.A.
11. Donal Fariz, S.H., M.H.
12. Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M.
13. Lakso Anindito, S.H., LL.M.
14. Pahruruzi Dalimunthe, S.H.
15. Muhammad Isrof Parhani, S.H., CIL.
16. Aura Akhman, S.H., M.H.
17. Alghiffari Aqsa, S.H.
18. Gufroni, S.H., M.H.
19. Ewi, S.H.
20. Syafril Elain, S.H.
21. Hafizullah, S.H.
22. Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.
23. Erik Anugra Windi, S.H., M.H.
24. Shaleh Al Ghifari, S.H.
25. Imanuel Gulo, S.H.
26. Ai Latifah Fardhiyah, S.H., M.H.
27. Merlina, S.H.
28. Ahmad Wakil Kamal S.H., M.H.
29. Dr. Hermawanto S.H., M.H.
30. Iwan Gunawan S.H., M.H.
31. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
32. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA, CTL.
33. Harimuddin, S.H.
34. Muhammad Razif Barokah, S.H., M.H.
35. Muhtadin, S.H.
36. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
37. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
38. Musthakim Alghosyaly, S.H.
39. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
40. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
41. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
42. Alif Fachrul Rahman, S.H.
43. Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.
44. Sarah Aisha Rizal S.H., M.H.
45. Raihan Azzahra, S.H., MCL





DPRD SURABAYA APRESIASI 'SURABAYA NIGHT ZOO'

RENI ASTUTI: KUALITAS HARUS SEBANDING TIKET, BUKA KOTAK SARAN

SURABAYA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengapresiasi pembukaan destinasi baru di Kota Pahlawan, 'Surabaya Night Zoo' atau SNZ. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendorong Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) selaku pengelola Kebun Binatang Surabaya membuka kotak saran untuk mengetahui tanggapan pengunjung terhadap pola pelayanan dan fasilitas wahana

Dia mengatakan tanggapan yang masuk melalui kotak saran itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pada aspek yang masih dirasa kurang oleh masyarakat. "Saya kira masyarakat Surabaya maupun pengunjung itu semakin cerdas dan apa yang bagus akan diinfokan, apa yang tidak bagus juga akan diinfokan," kata Reni, Senin (26/6/2023).

Menurutnya saran dan kritik yang masuk melalui layanan interaktif itu merupakan tantangan bagi manajemen KBS untuk menjaga kualitas dan mutu pelayanan bagi pengunjung.

Reni mengaku dia sempat mendapati adanya wisatawan asal Palembang, Sumatera Selatan yang menjajal secara perdana wahana SNZ di KBS. "Ada pengunjung dari Palembang yang lagi liburan ke Madiun tetapi dia ke sini juga. Ini juga menarik wisatawan ke sini," ucapnya.

Dia menyebut hal itu harus disikapi oleh manajemen KBS melakukan inovasi pelayanan untuk lebih menarik minat kedatangan wisatawan.

Lebih lanjut, terjaminnya pelayanan di SNZ dirasanya bisa memberikan dampak bagi promosi



Prosesi pemotongan pita dalam Grand Opening Surabaya Night Zoo Minggu, (25/06/2023).
(Jannatul Firdaus/Lenteratoday)

wisata di Kota Surabaya, khususnya destinasi pariwisata yang mengusung konsep di malam hari, seperti di Jalan Tunjungan dan Susur Sungai Kalimas.

"Variasi destinasi wisata yang semakin bertambah dan benar-benar bisa menghibur warga Surabaya dan menjadi rangkaian dari destinasi yang lain," ucapnya.

Selain pola pelayanan, kotak saran tersebut juga untuk mengetahui kepastian kualitas pelayanan yang terus dipantau. Menurutnya itu bentuk tanggung jawab atas besaran tiket yang berlaku Rp100 ribu per orang. "Tadi disampaikan warga Surabaya ada diskon 25 persen, Rp75 ribu. Ini yang saya kira terus dipantau antara besaran tiket dengan kualitas pelayanan," kata Reni.

Reni berharap manajemen KBS menjaga mutu kualitas layanan. Sehingga KBS dapat menjadi destinasi wisata yang bisa menghibur. "Fasilitas bagus, terasa sensasi malamnya. Lalu ada pembatasan lihat satwa. Satwa kena lampu. Pernak-pernik lukisan di lorong. Mengkaryakan melukis di jalan. Berkonsep pemberdayaan membuat mural," ucap Reni.

Termasuk sejumlah terobosan yang memudahkan masyarakat bisa mengakses SNZ, bisa diseimbangkan antara pemenuhan target pendapatan dengan menghibur warga.

Tantang Pemkot Buat Paket Wisata

Sementara Pemkot Surabaya pun, lanjut Reni, harusnya tertantang merangkai SNZ dengan sejumlah wisata khususnya yang

beraktivitas malam hari. Sehingga menjadi satu kesatuan, bukan malah mematikan destinasi lain. "Nanti meramaikan kuliner di Tunjungan atau di mana. Nah ini nanti bisa menjadi rangkaian," ujarnya.

Misalnya paket wisata yang menggabungkan sejumlah destinasi malam hari di Surabaya. Menurutnya hal ini akan mampu menggaet pengunjung. "(SNZ) ini inovasi malam paling terlihat. Tunjungan, susur Sungai Kalimas, Kya Kya. Cuma itu tadi syaratnya, perikehewan dan kemanusiaan. Prinsipnya ada kesejahteraan satwa jadi hal utama," tandasnya.

Diketahui, PDTS selaku pengelola KBS melakukan peresmian wahana wisata malam hari 'Surabaya Night Zoo; dan langsung dipadati ratusan orang pengunjung, Minggu (25/6/2023) malam.

Manajemen KBS mencatat bahwa pada pembukaan perdana SNZ dihadiri oleh 125 pengunjung. Jumlah itu berkurang dari yang sebelumnya 220 pemesan tiket, hal itu dikarenakan adanya pembatasan kuota.

Sebelumnya, Direktur Utama PDTS KBS Khoirul Anwar mengatakan target awal SNZ ini adalah menghadirkan tematik edukasi bagi pengunjung. Pengunjung terlebih dahulu dikenal-kan dengan satwa nokturnal, hingga bagaimana nantinya pengunjung dapat menikmati SNZ dengan baik.

Ia juga mengatakan, terdapat evaluasi perilaku pengunjung di Grand Opening ini. Di antaranya adalah masih banyak pengunjung yang menggunakan flash kamera

saat memotret, merokok di dalam SNZ, serta berbicara dengan keras. Ia juga mengatakan, akan ada petugas yang menjaga agar pengunjung merasa nyaman, dan juga sebagai garda terdepan apabila pengunjung melanggar aturan. "Kita sediakan keeper, di masing-masing zona itu ada 2. Lumayan banyak, sekitar hampir 16," jelasnya.

Terdapat 8 zona yang dapat dinikmati pengunjung di dalam SNZ. Jika dirincikan, zona tersebut meliputi zona awal sebagai welcoming yaitu fire dance, burung hantu, zona reptil, zona aquarium, zona ikan air tawar, zona ikan air laut, zona diorama dan nocturama. Saat mengunjungi SNZ, pengunjung akan dipandu oleh guide yang akan menjelaskan setiap zona menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Ke depan, setelah pengunjung teredukasi tentang hewan non-kultural, manajemen KBS akan mengajak pengunjung untuk menikmati suasana Surabaya Night Zoo seperti di hutan. Pihak majemen akan membiasakan pengunjung untuk tidak berisik dan tidak menggunakan flash atau cahaya kamera saat berkunjung. "Jadi nanti membiasakan tidak pakai flash, merokok, berbicara keras, itu beberapa hal yang lama kelamaan mereka akan terbiasa," terang Anwar. (ADV, Jannah/dya)



Pengunjung mendengarkan penjelasan dua tour guide berbahasa Indonesia dan Inggris memandu sejumlah pengunjung Surabaya Night Zoo, Minggu (25/6/2023).



RENI ASTUTI
WAKIL KETUA DPRD KOTA SURABAYA